



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT PENGELUARAN
2017 - 2021





**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT PENGELUARAN
2017 - 2021.**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

ISBN : 978-60271003-5-0

Nomor Publikasi : 35120.2203

Katalog BPS : 9302023.3512

Ukuran Buku : 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman : x + 60 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Ilustrasi cover:

Wisata Pantai Pasir Putih (sumber gambar: <https://www.manusialembah.com>)

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:
Bagas Susilo, S.ST , M.Si

Penyunting:
Ir. Dwi Irnawati

Penulis:
Mutiurrohman Sucianto, SST

Pengolah Data:
Mutiurrohman Sucianto, SST

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Situbondo, April 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Situbondo



Bagas Susilo, SST., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
BAB 2 METODE ESTIMASI & SUMBER DATA.....	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani rumah Tangga (PK-LNPRT).....	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	19
2.5 Perubahan Inventori (PI).....	21
2.6 Ekspor Impor.....	24
BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Situbondo Menurut Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	30
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	33
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	34
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB).....	36
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	38
3.7 Perkembangan Net Ekspor	39
BAB 4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN	41
4.1 PDRB (Nominal)	43
4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	44
4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	45
4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	46
BAB 5 PENUTUP.....	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo (Miliar Rp), 2017 - 2021	28
Tabel 3.2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo (Miliar Rp), 2017 - 2021	28
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	29
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	30
Tabel 3.5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, 2017-2021	31
Tabel 3.6	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, 2017-2021	33
Tabel 3.7	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Situbondo, 2017-2021	34
Tabel 3.8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2017-2021	36
Tabel 3.9	Perkembangan PMTB Kabupaten Situbondo, 2017-2021	37
Tabel 3.10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Situbondo, 2017-2021	39
Tabel 3.11	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Situbondo, 2017-2021	40
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo, 2017-2021	43
Tabel 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, 2017-2021	44
Tabel 4.3	Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Situbondo, 2017-2021	45
Tabel 4.4	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Situbondo, 2017-2021	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Situbondo (Miliar Rp), 2017 - 2021.....	29
----------	--	----

<https://situbondokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021	55
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021	56
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	57
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	58
Lampiran 5	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	59
Lampiran 6	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021	60

<https://situbondokab.go.id>

BAB

1

PENDAHULUAN

<https://situbondokab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (frame work) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa.

Secara konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (equivalent). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (statistical discrepancy).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (statistical discrepancy) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (final output)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (Income)	=	PDRB Produksi
C (Consumption)	=	Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (external transaction). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto" .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan

perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk Supply and Use Tables (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (benchmark) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (account) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- » Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- » Meningkatkan kualitas PDRB;
- » Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- » Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- » Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- » Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- » Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- » Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- » Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
- » Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- » Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index);
- » Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- a. Konsep dan Cakupan
 - » Sumber daya hayati (cultivated biological resources/CBR). CBR

merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- » Sistem persenjataan (military weapon systems/MWS). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- » Penelitian dan pengembangan (research and development/RnD). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- » Eksplorasi dan evaluasi mineral (mineral exploration and evaluation/MEE). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- » Bank Sentral (Central Bank/CB). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- » Komputer software (computer software and databases/CSD). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- » Produk kekayaan intelektual (entertainment, literary or artistic originals/ELA). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- » pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

b. Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (Financial intermediation services indirectly measured / FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (deposits), bunga pinjaman (loans), dan suku bunga referensi (reference). Metoda ini menggantikan metoda Imputed Bank Services Charge (IBSC).

c. Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (Basic Price). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

d. Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010	
(1)		(2)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga		1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	
4. Perubahan Inventori		4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	
5. Ekspor		5. Perubahan Inventori	
6. Impor		6. Ekspor	
		7. Impor	

BAB

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://situbondokab.bps.go.id>

METODE ESTIMASI & SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya
8. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
2. Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
3. Sensus Penduduk 2010, BPS
4. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
5. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota

terdekat);

7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani rumah Tangga (PK-LNPRT)

Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

Sumber Data

1. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
2. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
3. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
4. Indeks Harga Konsumen, BPS

Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh

dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya

yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

1. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
2. Statistik Keuangan Daerah, BPS
3. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
4. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
5. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
6. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + Social transfer in kind purchased market production + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

- » Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
- » PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset),

- produk kekayaan intelektual (intellectual property products);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

1. Metoda Langsung:

$$\text{PMTB_ADHB (Domestik)} = \text{Barang Modal Domestik} + \text{TTM} + \text{Pajak atas Produk (PPN)} + \text{Biaya Instalasi}$$

$$\text{PMT_ADHB (Impor)} = \text{Barang Modal Impor} + \text{TTM} + \text{Bea Impor} + \text{Biaya Instalasi}$$

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$\text{PMTB_ADHK} = \text{PMTB_ADHB/IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

2. Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

$$\text{PMTB_ADHB} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$$

Pendekatan Ekstrapolasi :

$$\text{PMT_ADHK} (t) = \text{PMTB atas dasar harga} (t-1) \times \text{Indeks Produksi} (t)$$

2.5 Perubahan Inventori (PI)

Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di

akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

1. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI_ADHB} = (\text{Volume Inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{P_ADHK} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

2. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI_ADHK} = \frac{\text{Inventori (t)_ADHB}}{\text{IHPB (t)}} - \frac{\text{Inventori (t-1) ADHB}}{\text{IHPB (t-1)}}$$

$$\text{PI_ADHB} = \text{PI_ADHK} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 Ekspor Impor

Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
2. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.
3. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB

3

**TINJAUAN
PEREKONOMIAN**
KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT PENGELUARAN

<https://situbondokab.go.id/>

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017 - 2021

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada periode 2017 sampai dengan 2021 mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Situbondo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 Tinjauan Agregat PDRB Situbondo Menurut Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Situbondo berdasarkan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 3.1. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena Pandemi Covid-19. Nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah diabaikan.

Nilai PDRB ADHB Situbondo selama kurun waktu 2017 hingga 2021

mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB ADHB Situbondo mencapai 17.475,02 miliar rupiah. Dalam rentang lima tahun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 21.200,85 miliar rupiah pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, maupun ekspor impor.

Tabel 3.1
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Konsumsi Rumah Tangga	12 280,80	13 245,06	14 175,25	14 114,55	14 927,42
2	Konsumsi LNPRT	225,58	244,84	265,37	272,58	289,32
3	Konsumsi Pemerintah	1 862,98	2 026,72	2 188,97	2 082,35	2 101,77
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 060,92	4 435,12	4 806,76	4 624,40	4 724,48
5	Perubahan Inventori	94,80	103,43	107,23	56,29	88,40
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 050,07	-1 197,22	-1 333,44	-1 108,31	- 930,54
Produk Domestik Regional Bruto		17 475,02	18 857,95	20 210,14	20 041,85	21 200,85

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari nilai PDRB ADHB, pada tahun 2021 ini perekonomian Situbondo secara agregat mengalami perbaikan bahkan pemulihan setelah terdampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 dimana nilainya lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 dan 2019.

Tabel 3.2
PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo (Miliar Rp), 2017 - 2021

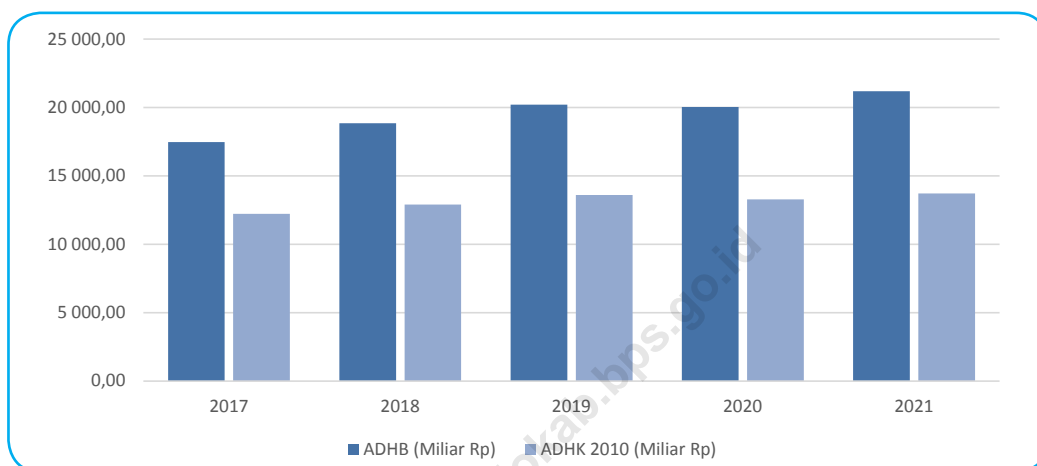
Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Konsumsi Rumah Tangga	9 071,17	9 481,61	9 916,00	9 716,35	10 141,04
2	Konsumsi LNPRT	142,43	150,43	158,64	159,89	166,52
3	Konsumsi Pemerintah	1 110,58	1 153,21	1 199,08	1 107,81	1 109,30
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 970,87	3 149,94	3 317,39	3 133,11	3 143,18
5	Perubahan Inventori	62,82	63,15	63,77	33,00	50,59
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 127,41	-1 100,41	-1 055,31	- 867,32	- 894,79
Produk Domestik Regional Bruto		12 230,46	12 897,92	13 599,57	13 282,84	13 715,83

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB ADHK Situbondo dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Situbondo mencapai 12.230,46 miliar rupiah. Kemudian dalam rentang lima tahun, nilai tersebut telah meningkat menjadi 13.715,83 miliar rupiah pada tahun 2021. Nilai ini juga menunjukkan kondisi perbaikan dan bahkan pemulihan setelah perekonomian Situbondo terkontraksi pada tahun 2020 lalu akibat Pandemi Covid-19.

Gambar 1
Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Situbondo (Miliar Rp), 2017 - 2021



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pembentukan nilai PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	70,28	70,24	70,14	70,43	70,41
2 Konsumsi LNPRT	1,29	1,30	1,31	1,36	1,36
3 Konsumsi Pemerintah	10,66	10,75	10,83	10,39	9,91
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,24	23,52	23,78	23,07	22,28
5 Perubahan Inventori	0,54	0,55	0,53	0,28	0,42
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,01	-6,35	-6,60	-5,53	-4,39
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Situbondo dari tahun 2017 hingga 2019 selalu tumbuh di atas 5 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,07 persen (2017); 5,46 persen (2018); dan 5,44 persen (2019). Masuknya wabah Covid-19 yang menerpa berbagai wilayah di Situbondo menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menjadi terhambat bahkan terpuruk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekonominya diangka -2,33 persen.

Pulihnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Situbondo pada tahun 2021 memberikan dampak positif terhadap membaiknya perekonomian Situbondo. Pemulihan perekonomian Situbondo dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang kembali menunjukkan nilai positif. Secara agregat nilai pertumbuhan ekonomi Situbondo tahun 2021 mencapai 3,26 persen. Angka ini memang tidak sebesar nilai pertumbuhan pada kondisi sebelum Pandemi, namun dengan awal pemulihan ini akan memberikan dampak positif pada tahun-tahun selanjutnya

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4,57	4,52	4,58	-2,01	4,37
2 Konsumsi LNPRT	1,22	5,62	5,45	0,79	4,15
3 Konsumsi Pemerintah	2,23	3,84	3,98	-7,61	0,13
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,98	6,03	5,32	-5,56	0,32
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	5,07	5,46	5,44	-2,33	3,26

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga secara struktur menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Lebih dari 70 persen dari nilai PDRB Situbondo bersumber dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.5
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	12 280,80	13 245,06	14 175,25	14 114,55	14 927,42
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9 071,17	9 481,61	9 916,00	9 716,35	10 141,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,28	70,24	70,14	70,43	70,41
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	18 148,00	19 478,23	20 746,07	20 595,32	21 686,20
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	13 404,95	13 943,69	14 512,49	14 177,67	14 732,67
Pertumbuhan (persen)					
a Total Konsumsi Rumah Tangga	4,57	4,52	4,58	-2,01	4,37
b Konsumsi Per Kapita	4,04	4,02	4,08	-2,31	3,91
Jumlah penduduk (Jiwa)	676 703	679 993	683 274	685 328	688 337

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.5 menunjukkan, jika dibandingkan kondisi lima tahun yang lalu, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selama periode tahun 2017 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan, kemudian pada tahun-tahun berikutnya porsi ini meningkat hingga tahun 2020 dan turun kembali pada tahun 2021. Titik tertinggi kontribusi konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2020 dengan porsi mencapai 70,50 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 70,14 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK selama periode 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,58 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -2,01 persen. Dalam kondisi normal, pada rentang 2017 hingga 2021 (kecuali tahun 2020) nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh perubahan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita selama tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa, pada periode sebelum ada Pandemi Covid-19, rata-rata konsumsi setiap penduduk di Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" dalam rentang periode 2017 hingga 2019 berkisar antara 4,02 persen hingga 4,08 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Pulihnya konsisi sosial dan ekonomi masyarakat Situbondo membawa dampak positif terhadap perekonomian Situbondo khususnya kondisi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Fasilitas dan mobilitas masyarakat yang sebelumnya dibatasi akibat Pandemi, pada tahun 2021 yang sudah kembali menuju kondisi normal membawa pergerakan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kondisi sebelumnya utamanya pengeluaran konsumsi per kapita. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi per kapita pada tahun 2021 yang sudah menunjukkan kondisi normal seperti sebelum adanya Pandemi. Nilai pertumbuhan konsumsi per kapita tahun 2021 mencapai 3,91 persen.

Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021 (kecuali tahun 2020), baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2017, secara umum setiap penduduk di Situbondo menghabiskan dana sekitar 18.148 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 19.478,23 ribu rupiah (2018); 20.746,07 ribu rupiah (2019); kemudian turun menjadi 20.595,32 ribu rupiah (2020); dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 21.686,20 ribu rupiah.

Struktur konsumsi rumah tangga Situbondo berdasarkan kelompok konsumsi didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Dalam periode 2017 hingga 2021, porsi konsumsi bukan makanan selalu lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Porsi konsumsi non makanan berada pada kisaran 62 hingga 65 persen, dan sisanya adalah konsumsi makanan (35-38 persen). Secara lebih detail, proporsi konsumsi makanan untuk setiap tahunnya adalah 36,72 persen (2017); 36,28 persen (2018); 35,87 persen (2019); 37,85 persen (2020); dan 38,33 persen (2021). Sementara itu, proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga Situbondo sebagian besar berada pada kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Porsi konsumsi pada kelompok ini berada pada kisaran 21 hingga 25 persen dari

total konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 3.6
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a Makanan, Minuman, dan Rokok	36,72	36,28	35,87	37,85	38,33
b Pakaian dan Alas Kaki	3,22	3,18	3,13	3,12	3,05
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,36	10,26	10,15	10,65	10,55
d Kesehatan dan Pendidikan	6,49	6,51	6,46	7,12	7,06
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24,03	24,44	24,83	21,40	21,31
f Hotel dan Restoran	17,35	17,52	17,75	17,90	17,66
g Lainnya	1,82	1,82	1,81	1,96	2,03
Total Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pola proporsi konsumsi tersebut, menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting akibat adanya perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangatlah kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan peranan LNPRT dalam perekonomian yang dilihat dari proporsinya terhadap total PDRB.

Selama periode tahun 2017-2021 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT

atas dasar harga berlaku mencapai 225,58 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 244,848 miliar rupiah (2018); 265,37 miliar rupiah (2019); 272,58 miliar rupiah (2020); dan 289,32 miliar rupiah (2021). Demikian pula dengan konsumsi LNPRT yang dinilai atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan. Konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2017 mencapai 142,43 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 150,43 miliar rupiah (2018); 158,64 miliar rupiah (2019); 159,89 miliar rupiah (2020) dan terus meningkat hingga mencapai 166,52 miliar rupiah pada tahun 2021.

Tabel 3.7
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	225,58	244,84	265,37	272,58	289,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	142,43	150,43	158,64	159,89	166,52
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1,29	1,30	1,31	1,36	1,36

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Proporsi konsumsi LNPRT dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif kecil, dengan kontribusi di bawah dua persen. Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Situbondo pada tahun 2017 hingga 2019 relatif stabil dengan kisaran 1,29 sampai 1,36 persen. Selanjutnya, kontribusi LNPRT terhadap PDRB tahun 2020 mengalami peningkatan, dari 1,31 persen (2019) menjadi 1,36 persen (2020) dan tidak berubah kontribusinya pada tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh kegiatan partai politik selama rangkaian pelaksanaan Pilkada 2020. Selain itu, kegiatan berbagai lembaga kemanusiaan selama masa pandemi Covid-19 juga turut berpengaruh pada tingkat konsumsi LNPRT pada tahun tersebut.

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Dalam perekonomian suatu wilayah, pemerintah memegang peranan yang penting. Untuk menjalankan roda perekonomian, unit pemerintah dapat berperan dalam aktivitas konsumsi barang dan jasa, aktivitas produksi barang dan jasa serta investasi, dan juga berperan sebagai regulator yang menetapkan

berbagai kebijakan baik di bidang fiskal maupun moneter.

Dalam rentang lima tahun terakhir, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.862,98 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2.101,77 miliar rupiah tahun 2021. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu tersebut dari 1.110,58 miliar rupiah (2017) menjadi 1.109,30 miliar rupiah (2021). Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Situbondo relatif stabil sepanjang tahun 2017 hingga 2021 dengan peranan sebesar 9-11 persen per tahun. Sepanjang periode ini, peran pemerintah cenderung turun dari 10,66 persen pada tahun 2017, kemudian terus bertambah setiap tahunnya hingga menyentuh angka 10,83 persen pada tahun 2019. Namun mulai menurun peranannya pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai angka 9,91 persen terhadap nilai total PDRB.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan konsumsi pemerintah seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 2.753,02 ribu rupiah kemudian naik menjadi 3.053,40 ribu rupiah pada tahun 2021.

Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan lima tahun lalu, namun konsumsi pemerintah tahun 2020 dan 2021 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 turun -7,61 persen. Sementara itu nilai konsumsi pemerintah per kapita turun -7,89 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan konsumsi pemerintah secara agregat tumbuh positif dengan pertumbuhan mencapai 0,13 persen. Meskipun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif, namun jika dilihat lebih mendalam, kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah belum menunjukkan pemulihan seperti pada kondisi sebelum Pandemi. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB ADHK konsumsi pemerintah pada tahun 2021 yang belum lebih baik dibandingkan tahun 2019. Disisi lain, jika dilihat dari konsumsi pemerintah per kapita pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif dengan angka mencapai -0,30 persen. Belum pulihnya konsumsi pemerintah hingga tahun 2021 ini diakibatkan oleh efisiensi anggaran dan realokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah selama Pandemi Covid-19 hingga tahun 2021.

Tabel 3.8
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 862,98	2 026,72	2 188,97	2 082,35	2 101,77
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 110,58	1 153,21	1 199,08	1 107,81	1 109,30
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	10,66	10,75	10,83	10,39	9,91
Rata-rata konsumsi Pemerintah per-kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	2 753,02	2 980,50	3 203,65	3 038,47	3 053,40
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	1 641,17	1 695,92	1 754,90	1 616,47	1 611,57
Pertumbuhan (persen)					
a Total Konsumsi Pemerintah	2,23	3,84	3,98	-7,61	0,13
b Konsumsi Per Kapita	1,72	3,34	3,48	-7,89	-0,30
Jumlah penduduk (Jiwa)	676 703	679 993	683 274	685 328	688 337

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi fisik⁸. Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Dalam kurun waktu lima tahun, nilai PMTB Situbondo mengalami peningkatan yang pesat. Jika dinilai ADHB, PMTB Situbondo naik dari 4.060,92 miliar rupiah (2017) menjadi 4.724,48 miliar rupiah (2021) dan jika dinilai ADHK 2010, naik dari 2.970,87 miliar rupiah (2017) menjadi 3.143,18 miliar rupiah (2021).

Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Situbondo cukup besar. Sumbangan komponen ini berkisar antara 22-24 persen dari total PDRB. Dari sisi pertumbuhan riil, sepanjang tahun 2017 hingga 2019, PMTB selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 6,03 persen. Namun, pada tahun 2020 kinerja PMTB terhambat oleh merebaknya

virus Covid-19 di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan komponen PMTB tumbuh negatif sebesar -5,36 persen. Pada tahun 2021 komponen pengeluaran PMTB ini belum pulih sepenuhnya. Dari sisi pertumbuhannya, pada tahun 2021 komponen PMTB ini telah tumbuh positif jika dibandingkan tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, pertumbuhan positif ini belum sepenuhnya membuat komponen PMTB ini pulih 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari nilai PMTB ADHK pada tahun 2021 dimana capaiannya belum sebaik atau melebihi nilai capaian pada tahun 2019.

Ditinjau menurut jenisnya, PMTB dibedakan menjadi 2 jenis aset, yakni bangunan dan non bangunan. Struktur PMTB Situbondo sepanjang tahun 2017 hingga 2021 didominasi oleh PMTB bangunan. Proporsi PMTB bangunan terhadap total PMTB berkisar sekitar 78-79 persen setiap tahunnya. Sementara PMTB non bangunan mempunyai kontribusi sekitar 21-22 persen terhadap nilai total PMTB. Dilihat dari perkembangan PMTB bangunan selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Capaian PMTB bangunan ADHB tahun 2017 mencapai 3.197,55 miliar rupiah dan meningkat hingga tahun 2021 yang mencapai 3.686,99 miliar rupiah. Kondisi yang sama juga terjadi pada PMTB non bangunan dimana nilai dari PMTB subkategori ini juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2017 PMTB non bangunan ADHB mencapai 863,37 miliar rupiah meningkat menjadi 1.037,49 miliar rupiah pada tahun 2021.

Tabel 3.9
Perkembangan PMTB Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4 060,92	4 435,12	4 806,76	4 624,40	4 724,48
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2 970,87	3 149,94	3 317,39	3 133,11	3 143,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	23,24	23,52	23,78	23,07	22,28
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	3 197,55	3 493,14	3 796,35	3 636,15	3 686,99
(%)	78,74	78,76	78,98	78,63	78,04
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	863,37	941,98	1 010,41	988,25	1 037,49
(%)	21,26	21,24	21,02	21,37	21,96
Total PMTB (Miliar Rp)	4 060,92	4 435,12	4 806,76	4 624,40	4 724,48
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan PMTB (persen)	5,98	6,03	5,32	-5,56	0,32

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Barang persediaan bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, maupun bahan penolong.

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Nilai perubahan inventori Situbondo tahun 2017 sebesar 94,80 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga berlaku dan 62,82 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga konstan 2010. Nilai perubahan inventori cenderung stabil hingga tahun 2019 dengan kontribusi terhadap total PDRB sekitar 0,5 persen setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kontribusi perubahan inventori mengalami penurunan dari 0,53 persen (2019) menjadi 0,28 persen. Penurunan ini didorong oleh pelemahan kegiatan ekonomi Situbondo selama masa pandemi Covid-19. Terhambatnya pasokan barang, baik dari luar negeri dan luar kabupaten berdampak pada penurunan nilai perubahan inventori. Pada tahun 2021 kondisi pasokan barang mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini mendorong nilai Perubahan Inventori pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Namun demikian, kondisi yang terjadi pada tahun 2021 belum sepenuhnya membaik seperti kondisi sebelum pandemi.

Tabel 3.10
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a ADHB (Miliar Rp)	94,80	103,43	107,23	56,29	88,40
b ADHK 2010 (Miliar Rp)	62,82	63,15	63,77	33,00	50,59
Proporsi terhadap PDRB % ADHB	0,54	0,55	0,53	0,28	0,42

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.7 Perkembangan Net Ekspor

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerahnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Situbondo tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Situbondo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*)

oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Situbondo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Situbondo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Berdasarkan tabel 3.11, baik secara harga berlaku maupun harga konstan 2010, nilai net ekspor Kabupaten Situbondo bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi ekspor barang jasa lebih kecil dibandingkan nilai ekonomi impornya.

Secara total, dalam kurun waktu 2017-2021 nilai net ekspor antar daerah menunjukkan tren yang berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2017, nilai net ekspor antar daerah sebesar -1.050,07 miliar rupiah, kemudian turun menjadi -1.197,22 miliar pada tahun 2018. Pada tahun berikutnya nilai net ekspor barang dan jasa masih mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi -1.333,44 miliar rupiah. Menuju tahun 2020 net ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai -1.108,31 miliar rupiah; dan turun kembali pada tahun 2021 mencapai -930,54 miliar rupiah.

Berbeda dengan nilai net ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai net ekspor antar daerah atas dasar harga Konstan 2010 menunjukkan arah peningkatan. Pada tahun 2017 nilai net ekspor barang jasa sebesar -1.127,41 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 secara harga konstan 2010 hingga mencapai -894,79 miliar rupiah.

Tabel 3.11
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a ADHB (Miliar Rp)	-1 050,07	-1 197,22	-1 333,44	-1 108,31	- 930,54
b ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1 127,41	-1 100,41	-1 055,31	- 867,32	- 894,79
Proporsi terhadap PDRB % ADHB	-6,01	-6,35	-6,60	-5,53	-4,39

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

BAB

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN

<https://situbondokab.go.id>

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Situbondo, namun di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah (produksi), pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Miliar Rp)	17 475,02	18 857,95	20 210,14	20 041,85	21 200,85
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	12 230,46	12 897,92	13 599,57	13 282,84	13 715,83
Pertumbuhan PDRB (Persen)	5,07	5,46	5,44	- 2,33	3,26
PDRB per Kapita/tahun (ribu Rp)					
a. ADHB (Ribuan Rp)	25 823,76	27 732,56	29 578,38	29 244,18	30 800,10
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	18 073,60	18 967,73	19 903,54	19 381,72	19 926,05
Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,53	4,95	4,93	- 2,62	2,81
Jumlah Penduduk (Jiwa)	676 703	679 993	683 274	685 328	688 337
Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,51	0,49	0,48	0,30	0,44

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga

dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, PDRB per kapita Kabupaten Situbondo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk keculai tahun 2020. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Situbondo rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Selama kurun waktu tahun 2017-2019, pertumbuhan PDRB per kapita secara "riil" mampu tumbuh di atas empat persen dan pada tahun 2021 tumbuh di atas dua persen. Disisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat secara rata-rata di bawah satu persen setiap tahunnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi.

4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	12 280,80	13 245,06	14 175,25	14 114,55	14 927,42
b. LNPRT	225,58	244,84	265,37	272,58	289,32
c. Pemerintah	1 862,98	2 026,72	2 188,97	2 082,35	2 101,77
Total konsumsi Akhir (Miliar Rp)	14 369,37	15 516,62	16 629,59	16 469,48	17 318,51
PDRB ADHB (Miliar Rp)	17 475,02	18 857,95	20 210,14	20 041,85	21 200,85
Proporsi terhadap PDRB (Persen)	82,23	82,28	82,28	82,18	81,69

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah Situbondo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Hal ini tercermin dari proporsi permintaan akhir yang berada di sekitar 81 hingga 82 persen. Jika diperhatikan selama lima tahun terakhir, proporsi konsumsi akhir cenderung stabil. Pada tahun 2017 proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mencapai 82,23 persen dan meningkat terus sampai pada tahun 2019 mencapai 82,28 persen. Kemudian kontribusi ini menurun pada tahun 2020 dan 2021 hingga menjadi 81,69 persen. Laju peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume dan juga harga.

4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Situbondo digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3
Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Miliar Rp)	12 280,80	13 245,06	14 175,25	14 114,55	14 927,42
b. Total Konsumsi PMTB ADHB (Miliar Rp)	4 060,92	4 435,12	4 806,76	4 624,40	4 724,48
Rasio Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB (Persen)	3,02	2,99	2,95	3,05	3,16

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB adalah sebesar 3,02, kemudian mulai berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Tercatat rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2018 hingga 2021 masing-masing sebesar 2,99; 2,95; 3,05 dan 3,16. Penurunan rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB hingga tahun 2019 disebabkan oleh adanya peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan, serta nilai peningkatannya lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga. Sementara itu pada tahun 2020 dan 2021 nilai rasio ini mengalami peningkatan.

Hal ini mengindikasikan selama tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh adanya penanganan pandemi Covid-19.

4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) maka akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Penghitungan ICOR menggunakan formula sebagai berikut.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

- I_t = PMTB tahun ke t
- Y_t = Output tahun ke t
- Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Selama periode tahun 2017-2021, besaran ICOR cenderung fluktuatif pada kisaran 4 sampai 7 dengan kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun 2020. Hal ini berarti setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 4 sampai 7 unit. ICOR Kabupaten Situbondo selama periode 2017-2021 tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 7,26. Sedangkan pada tahun 2020, nilai ICOR Kabupaten Situbondo bernilai negatif. Kondisi ini terjadi karena output yang dihasilkan selama tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya,

meskipun investasi fisik masih terbentuk pada tahun tersebut. Penurunan nilai output ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menghambat kinerja perekonomian Situbondo. Sementara pada tahun 2021 mengalami perbaikan kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat Situbondo sehingga berdampak positif terhadap kondisi kinerja perekonomian Situbondo.

Tabel 4.4
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Situbondo, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	12 230,46	12 897,92	13 599,57	13 282,84	13 715,83
Perubahan (Miliar Rp)	589,70	667,47	701,65	- 316,74	433,00
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2 970,87	3 149,94	3 317,39	3 133,11	3 143,18
ICOR	5,04	4,72	4,73	- 9,89	7,26

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://situbondokab.bps.go.id>

BAB

5

PENUTUP

<https://situbondokab.bps.go.id>

PENUTUP

1. PDRB menurut Pengeluaran tahun 2017-2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Situbondo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga) sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017-2021, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Situbondo terhadap ekonomi daerah lain.



LAMPIRAN

<https://situbondokab.bps.go.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	12 280,80	13 245,06	14 175,25	14 114,55	14 927,42
2 Konsumsi LNPR	225,58	244,84	265,37	272,58	289,32
3 Konsumsi Pemerintah	1 862,98	2 026,72	2 188,97	2 082,35	2 101,77
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 060,92	4 435,12	4 806,76	4 624,40	4 724,48
5 Perubahan Inventori	94,80	103,43	107,23	56,29	88,40
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 050,07	-1 197,22	-1 333,44	-1 108,31	-930,54
Produk Domestik Regional Bruto	17 475,02	18 857,95	20 210,14	20 041,85	21 200,85

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	9 071,17	9 481,61	9 916,00	9 716,35	10 141,04
2	Konsumsi LNPRT	142,43	150,43	158,64	159,89	166,52
3	Konsumsi Pemerintah	1 110,58	1 153,21	1 199,08	1 107,81	1 109,30
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 970,87	3 149,94	3 317,39	3 133,11	3 143,18
5	Perubahan Inventori	62,82	63,15	63,77	33,00	50,59
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 127,41	-1 100,41	-1 055,31	- 867,32	- 894,79
Produk Domestik Regional Bruto		12 230,46	12 897,92	13 599,57	13 282,84	13 715,83

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	70,28	70,24	70,14	70,43	70,41
2 Konsumsi LNPRT	1,29	1,30	1,31	1,36	1,36
3 Konsumsi Pemerintah	10,66	10,75	10,83	10,39	9,91
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,24	23,52	23,78	23,07	22,28
5 Perubahan Inventori	0,54	0,55	0,53	0,28	0,42
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,01	-6,35	-6,60	-5,53	-4,39
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://situbondokab.bps.go.id>

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4,57	4,52	4,58	-2,01	4,37
2 Konsumsi LNPRT	1,22	5,62	5,45	0,79	4,15
3 Konsumsi Pemerintah	2,23	3,84	3,98	-7,61	0,13
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,98	6,03	5,32	-5,56	0,32
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	5,07	5,46	5,44	-2,33	3,26

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	135,38	139,69	142,95	145,27	147,20
2 Konsumsi LNPRT	158,39	162,75	167,28	170,48	173,75
3 Konsumsi Pemerintah	167,75	175,75	182,55	187,97	189,47
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	136,69	140,80	144,90	147,60	150,31
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	142,88	146,21	148,61	150,89	154,57

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://situbondokab.bps.go.id>

Lampiran 6 Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran (Persen), 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	2,87	3,18	2,33	1,62	1,33
2 Konsumsi LNPRT	3,60	2,76	2,78	1,92	1,92
3 Konsumsi Pemerintah	4,14	4,77	3,87	2,97	0,80
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,05	3,01	2,91	1,86	1,84
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	2,16	2,33	1,64	1,53	2,44

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Wringinanom No 78 Situbondo-Jawa Timur
Telp. (0338) 670269 Fax. (0338) 671996
Email. bps3512@bps.go.id
homepage. <https://situbondokab.bps.go.id>

ISBN 978-602-71003-5-0



9 786027 100350